



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2024



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU**

KATA PENGANTAR

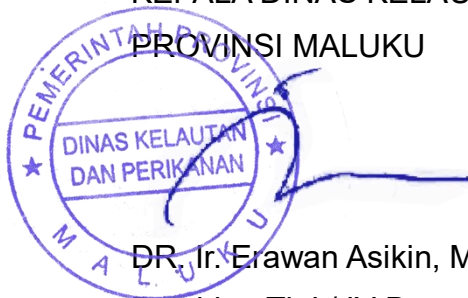
Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-undang ini dikenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sebagai kelengkapannya.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku telah Menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan di tahun 2025. Rencana Kerja ini memuat isu dan permasalahan di bidang Kelautan dan Perikanan serta program dan kegiatan yang akan dilaksana guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan pembiayaannya.

Diharapkan Rencana Kerja ini mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Maluku serta Instansi terkait lainnya sehingga Sektor Kelautan dan Perikanan di Maluku dapat dikembangkan menjadi sector unggulan yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Maluku pada Khususnya dan Masyarakat Indonesia pada umumnya.

Akhir Kata semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kelautan dan Perikanan di Maluku.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU



DR. Ir. Erawan Asikin, M.Si.
Pembina Tk.I / IV-B

NIP. 19690503 199503 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	4
2.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran	4
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
2.4. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Opd	13
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2024	
3.1. Tujuan Renja	14
3.2. Sasaran Renja	14
3.3. Program dan Kegiatan	14
3.4. Penyebaran Lokasi Program Dan Kegiatan	14
3.5. Rencana Tindak Lanjut	15
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Catatan Penting	16
4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	16
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	7
------------	---	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM OPD, adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. RPJM OPD ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2025.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap perumusan rancangan Renstra berupa pengolahan data informasi tentang Pembangunan kelautan dan perikanan periode sebelumnya, perumusan visi, misi, strategis, tujuan dan kebijakan sesuai dengan RPJM, analisis Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Reviuw terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penelahan terhadap RTRW Provinsi Maluku serta analisis dokumen hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan tahap penyajian Rancangan Renstra yang terdiri dari: pendahuluan, Gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Kewajiban untuk Menyusun Renja OPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja OPD Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku disusun dengan maksud sebagai perwujudan dari mekanisme koordinasi dan konsolidasi perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Maluku adalah:

- a. Mewujudkan perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku
- b. Merumuskan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Dana Indikatif dalam RKPD yang merupakan jabaran penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok, sasaran, Lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi PELAKSANAAN Renja Tahun 2023

Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar Pembangunan yaitu: *Pro-poor* (Pengentasan Kemiskinan), *pro-job* (Penyerapan tenaga kerja), *pro-growt* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Sepanjang tahun 2023, berbagai program/ kegiatan Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku telah dapat diselesaikan, walaupun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya lewat kebijakan-kebijakan Pembangunan kelautan dan perikanan kedepan. Berbagai permasalahan Pembangunan kelautan dan perikanan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan kelautan dan perikanan antara lain:

- 1) Tingkat Kemiskinan Masyarakat yang masih tinggi terutama untuk pulau-pulau kecil dan terluar;
- 2) Belum tercapainya target produksi perikanan budidaya yang diakibatkan karena faktor lingkungan seperti hama penyakit dan kondisi cuaca yang tidak menentu;
- 3) Terjadinya degradasi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.2. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung pada APBD untuk penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 103.031.095.255,-. Dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun sebesar Rp. 101.148.778.710,- atau mencapai 98,17% sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 1.882.316.545,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan dan Gugus Pulau III, dengan pagu sebesar 96.076.393.676,- dan realisasi sebesar Rp. 94.317.264.801,- atau 98,17%
- 2) UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya dengan pagu sebesar 350.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 347.744.557,- atau 99,36%



- 3) UPTD Balai Budidaya Laut Tual dengan pagu sebesar 920.746.988,- dan realisasi sebesar Rp. 912.647.526,- atau 99,12%
- 4) UPTD Balai Budidaya Laut Dobo dengan pagu sebesar 573.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 572.651.220,- atau 99,94%
- 5) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo dengan pagu sebesar 499.999.560,- dan realisasi sebesar Rp. 499.971.598,- atau 99,99%
- 6) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Banda dengan pagu sebesar 449.999.972,- dan realisasi sebesar Rp. 433.160.820,- atau 96,26%
- 7) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau I dengan pagu sebesar 300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 294.599.655,- atau 98,20%
- 8) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau II dengan pagu sebesar 299.999.520,- dan realisasi sebesar Rp. 294.730.315,- atau 98,24%
- 9) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau IV dengan pagu sebesar 300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 294.758.986,- atau 98,25%
- 10) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau V dengan pagu sebesar 329.999.599,- dan realisasi sebesar Rp. 323.047.324,- atau 97,89%
- 11) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VI dengan pagu sebesar 299.999.620,- dan realisasi sebesar Rp. 292.958.160,- atau 97,65%
- 12) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VII dengan pagu sebesar 613.959.000,- dan realisasi sebesar Rp. 602.807.745,- atau 98,18%
- 13) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VIII dengan pagu sebesar 650.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 648.719.559,- atau 99,80%
- 14) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau IX dengan pagu sebesar 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 456.511.501,- atau 91,30%



- 15) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau X dengan pagu sebesar 300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 296.883.184,- atau 98,96%
- 16) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau XI dengan pagu sebesar 267.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 262.381.399,- atau 98,27%
- 17) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau XII dengan pagu sebesar 299.997.320,- dan realisasi sebesar Rp. 297.940.360,- atau 99,31%

2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis pencapaian Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dilakukan berdasarkan keluaran perhitungan dari Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Keluaran pengukuran ini dievaluasi dengan Analisa terhadap pencapaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut.

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam Upaya pencapaian misi untuk dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Evaluasi dan Analisis Kinerja dilakukan berdasarkan pada pencapaian sasaran yang telah dilakukan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran yang disusun. Rincian Evaluasi dan Analisis Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja
 Penyelenggara Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
 Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja/Hasil (Outcome)	Pagu	Realisasi	Persen %	Ket
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		38.271.991.367	37.617.198.737	98,29%	
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.443.689.020	3.406.063.326	98,91%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.402.389.020	3.364.763.326	98,89%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.300.000	41.300.000	100,00%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.542.557.690	19.465.328.486	99,60%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	19.542.557.690	19.465.328.486	99,60%	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		109.033.600	105.701.180	96,94%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	109.033.600	105.701.180	96,94%	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		283.875.000	276.520.422	97,41%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	104.500.000	104.496.742	100,00%	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	179.375.000	172.023.680	95,90%	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.020.331.989	2.880.814.839	95,38%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	122.754.180	106.923.220	87,10%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	912.956.294	912.699.620	99,97%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	266.898.465	266.170.370	99,73%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100.639.500	99.046.550	98,42%	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000	35.890.000	99,69%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	82.098.000	56.978.700	69,40%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	825.408.000	779.545.859	94,44%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	673.577.550	623.560.520	92,57%	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		390.431.900	380.045.500	97,34%	
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	80.195.500	80.095.500	99,88%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	282.736.400	272.450.000	96,36%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000	27.500.000	100,00%	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.344.523.500	5.060.541.074	94,69%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.500.000	17.846.000	96,46%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.229.626.800	959.379.972	78,02%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.096.396.700	4.083.315.102	99,68%	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.137.548.668	6.042.183.910	98,45%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.773.437.248	5.695.956.960	98,66%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.195.700	148.349.950	89,26%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.415.720	196.377.000	99,98%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	100,00%	
II	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		9.248.706.980	9.015.096.502	97,47%	
9	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		8.701.858.580	8.485.470.956	97,51%	

	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	146.107.100	107.026.619	73,25%	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	8.555.751.480	8.378.444.337	97,93%	
10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		50.720.000	49.940.000	98,46%	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Tercatatnya Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	50.720.000	49.940.000	98,46%	
11	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		496.128.400	479.685.546	96,69%	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	290.525.400	282.764.734	97,33%	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.210.000	3.210.000	100,00%	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.100.000	13.850.000	91,72%	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	187.293.000	179.860.812	96,03%	
III	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		37.929.411.024	37.496.454.139	98,86%	
12	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		13.062.351.024	12.993.518.031	99,47%	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	92.230.000	79.282.640	85,96%	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12.970.121.024	12.914.235.391	99,57%	
13	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		95.480.000	79.252.000	83,00%	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	3.600.000	-	0,00%	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	91.880.000	79.252.000	86,26%	
14	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		5.480.000	5.080.000	92,70%	

	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.480.000	5.080.000	92,70%	
15	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		24.765.200.000	24.417.704.108	98,60%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.672.000.000	24.324.504.108	98,59%	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	93.200.000	93.200.000	100,00%	
16	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		900.000	900.000	100,00%	
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	900.000	900.000	100,00%	
IV	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		7.838.714.704	7.684.977.000	98,04%	
17	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		134.090.000	129.181.950	96,34%	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	101.100.000	98.626.950	97,55%	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	32.990.000	30.555.000	92,62%	
18	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		24.310.000	23.415.000	96,32%	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.310.000	23.415.000	96,32%	
19	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	7.680.314.704	7.532.380.050	98,07%	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.800.000	3.800.000	100,00%	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	6.977.306.920	6.830.749.832	97,90%	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		84.000.000	83.336.000	99,21%	

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	154.150.000	154.148.900	100,00%	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		31.757.400	31.757.000	100,00%	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.396.000	13.696.000	95,14%	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	414.904.384	414.892.318	100,00%	
V	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		6.671.317.280	6.541.162.060	98,05%	
20	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		6.663.057.280	6.532.902.060	98,05%	
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	5.856.169.280	5.737.227.694	97,97%	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	376.240.000	368.444.600	97,93%	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	10.148.000	10.131.900	99,84%	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	420.500.000	417.097.866	99,19%	
21	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		8.260.000	8.260.000	100,00%	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8.260.000	8.260.000	100,00%	
VI	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		3.070.953.900	2.793.890.272	90,98%	
22	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		21.640.000	21.040.000	97,23%	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	21.640.000	21.040.000	97,23%	

23	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		2.399.313.900	2.217.932.014	92,44%	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.600.000	3.600.000	100,00%	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2.395.713.900	2.214.332.014	92,43%	
24	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		650.000.000	554.918.258	85,37%	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	650.000.000	554.918.258	85,37%	
	TOTAL		103.031.095.255	101.148.778.710	98,17%	

2.4. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Isu-Isu Strategis yang dapat diangkat menanggapi keadaan yang ada saat ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku adalah antara lain:

- a) Kemiskinan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b) Aksesibilitas yang mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Lemah;
- c) Transformasi dan Transfer IPTEK Kelautan dan Perikanan Kurang;
- d) Degradasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e) Kualitas Sumberdaya Manusia Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Trampil, Terbatas;
- f) Added Value Produksi Kelautan dan Perikanan Rendah;
- g) Kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dan/atau Sentra Perikanan laut Nasional;
- h) Infrastruktur Kelautan dan Perikanan Terbatas;
- i) Konflik Pemanfaatan Ruang;
- j) Degradasi Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- k) Produksi Perikanan Fluktuatif;
- l) Konflik Kebijakan;
- m) Kebijakan Industrilisasi berbasis Kelautan dan Perikanan
- n) Keterbatasan Anggaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- o) Global Warning;
- p) Impilikasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2024

3.1. TUJUAN

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai Dokumen dasar perencanaan dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan dibidang Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat di daerah Maluku yang terintegrasi, efisien dan komperhensif, untuk pencapaian tujuan dan sarana Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.

3.2. SASARAN RENJA

Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2024 ini adalah memberikan arah, membangkitkan kesadaran dan komitmen bersama untuk melakukan perubahan dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah, serta menyamakan persepsi Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku tentang rencana Implementasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Maluku untuk kurun waktu 1 tahun.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD 2019-2024 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 2019-2024, maka dalam tahun anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan (Form Rincian Renja terlampir).

3.4. PENYEBARAN LOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan. Rencana Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2024 tersebar hampir pada semua Kab/Kota.



3.5. RENCANA TINDAK LANJUT

Setiap Program dan Kegiatan yang telah berjalan harus dievaluasi agar dapat menentukan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku kedepan, yang relevan dengan Rencana Strategis baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.



BAB IV PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2024 ini telah disusun melalui proses koordinasi dan sinkronisasi, dan mengacu kepada arah Kebijakan Nasional Visi - Misi Kepala Daerah dan Rencana Strategis Provinsi Maluku. Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai acuan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, untuk itu keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Renja ini pada akhirnya akan sangat tergantung kepada alokasi anggaran dan etos kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggara pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku merupakan bagian yang sangat penting sebagai upaya untuk mendukung pembangunan daerah, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam rangka **"Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"** dapat dicapai.

4.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

- Tahapan Penyusunan Rencana Kerja di Pemerintah Daerah
- Penetapan Dokumen Kerja dan Alokasi Anggaran di Pemerintah Daerah
- Penetapan Jadwal Pelaksanaan Program
- Pembuatan Term Of Reverence (Kerangka Acuan) setiap Program dan kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai Prosedur kerja yang berlaku di pemerintah Daerah baik Administrasi maupun Keuangan
- Pembuatan Laporan Kerja dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Evaluasi.